

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUMAS

Oleh :

Agus Prabawa

Abstract

This research purposed to identify factors that influence regional original receipt in Banyumas Regency. Based on the identification in the research, so researcher conclude that there are four factors which influence regional original receipt in a regency/city. They are local tax, local retribution, share profits from the local government enterprises, and other official regional revenues.

The data in this research generally has been taken from secondary data that is derived from local government of Banyumas Regency and also both Banyumas and Central Java Statistical Center Bureau. The data are Regional Original Receipt after local autonomy government be held in Indonesia, begins from year of 2000 until the last data reported (2007).

The regression analysis show that both simultaneously and partially, factors that influences regional original receipt are local tax, local retribution, share profits from the local government enterprises, and other official regional revenues. The significant statistic yield from the analysis of independent variables is very high. Its because the identification of factors that influence regional original receipt can be identified perfectly.

The importance thing that needs to be known is about factor that has the highest influence to the regional original receipt of Banyumas Regency. Elasticity analysis show that local retribution has the highest influence to the Banyumas regency regional original receipt, and then followed by local tax, other official regional revenues, and the last one receipt from share profits from the local government enterprises.

Keywords: regional original receipt, local tax, local retribution, share profits from the local government enterprises, and other official regional revenues

PENDAHULUAN

Pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu *fungsi alokasi* yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; *fungsi distribusi* yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan *fungsi stabilisasi* yang meliputi, antara lain, pertahanan-

keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya perlu

diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

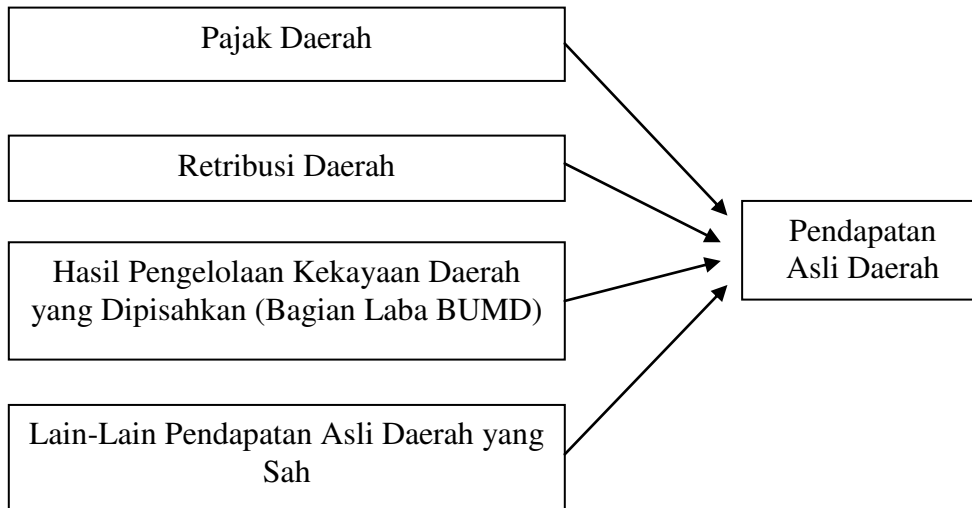
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan diberikan pada Pemerintah Daerah, kecuali untuk lima hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, yaitu pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman Pemerintah Pusat.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Penjelasan tentang sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah otonom di atas mengisyaratkan bahwa daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri secara optimal, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Ini artinya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan pembangunan harus bisa menjadi sumber pembiayaan terbesar.

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui, *pertama*, pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Kedua, seberapa besar retribusi daerah berpengaruh lebih nyata dibandingkan dengan variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Penelitian ini digambarkan seperti dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar I
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Kabupaten Banyumas. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain, khususnya berasal dari arsip-arsip yang ada di DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan sebagian lagi berasal dari Kantor Biro Pusat Statistik (BPS). Data primer juga digali melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk melengkapi data penelitian ini.

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan perhitungan matematis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya PAD atas kontribusi dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah digunakan analisis regresi linier berganda.

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas digunakan uji F.
3. Untuk menguji variabel bebas secara parsial terhadap variabel tidak bebas, maka dilakukan uji t.
4. Untuk menguji variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling berarti terhadap PAD digunakan analisis elastisitas (Pindyck, 1991)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Bagian ini menganalisis data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk disajikan dalam bentuk yang baik sehingga bisa menjadi informasi yang berguna.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu dari tahun 2000 s.d. 2007,

perolehan pajak daerah yang paling dominan adalah berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang rata-ratanya mencapai Rp 10.513923.560,00 atau 83,32% dari seluruh penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tersebut. Kemudian disusul oleh Pajak Hotel dan Restoran yang memberi kontribusi sebesar 8,90% rata-rata selama kurun waktu tersebut (Tabel 1).

Tabel 1
Rata-rata Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 s.d. 2007

No	Pajak Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-Rata dalam %
1	Pajak Hotel dan Restoran	Rp 1.123.565.586	8,904%
2	Pajak Hiburan	Rp 146.426.986	1,160%
3	Pajak Reklame	Rp 549.090.356	4,351%
4	Pajak Penerangan Jalan	Rp 10.513.923.560	83,319%
5	Pajak Bahan Galian Gol C	Rp 162.753.671	1,290%
6	Pajak ABT dan AP	Rp 72.875.166	0,578%
7	Pajak Parkir	Rp 22.676.175	0,180%
8	Tunggakan Pajak	Rp 27.501.169	0,218%
9	Denda Pajak	Rp 42.945	0,000%
Total		Rp 12.618.855.613	100,000%

2. Retribusi Daerah

Sumber penerimaan PAD kedua adalah dari Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara umum retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Tabel 2
Rata-rata Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 s.d. 2007

No	Jenis Retribusi	Rata-Rata dalam Rp	Rata-rata dalam %
1	Pelayanan Kesehatan	Rp 20.318.239.840	77,91%
2	Pelayanan Persampahan	Rp 381.570.650	1,46%
3	Pgtn Biaya Cetak KTP dan AKTE	Rp 1.388.655.784	5,33%
4	Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rp 389.405.731	1,49%
5	Pasar	Rp 2.141.134.422	8,21%
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 424.978.655	1,63%
7	Terminal	Rp 1.033.757.706	3,96%
Jumlah		Rp 26.077.742.789	100,00%

Untuk Retribusi Jasa Umum, seperti terlihat dalam Tabel 2 di atas, selama kurun waktu tahun 2000 s.d. 2007 jenis retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan pemerintah daerah memberi kontribusi terbesar, yaitu rata-rata 77,91% atau senilai Rp 20.318.239.840,00, kemudian disusul Retribusi Pasar sebesar 8,21%.

Retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Selama kurun waktu tahun 2000 s.d. 2007 kontribusi retribusi jasa usaha paling besar terhadap pemerintah daerah Kabupaten Banyumas berasal dari sektor retribusi jasa usaha berupa Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yaitu rata-rata sebesar Rp 1.444.496.244,00 atau 57,41% dari keseluruhan retribusi jasa usaha yang diselenggarakan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Rata-rata Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 s.d. 2007

No	Jenis Retribusi	Rata-Rata dalam Rp	Rata-rata dalam %
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 607.575.381	24,15%
2	Pesanggrahan/Villa	Rp 750.000	0,03%
3	Penyedotan Kakus	Rp 2.335.425	0,09%
4	Rumah Potong Hewan	Rp 328.940.450	13,07%
5	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp 1.444.496.244	57,41%
6	Pjln Produksi Usaha Daerah	Rp 132.217.260	5,25%
Jumlah		Rp 2.516.314.760	100,00%

Retribusi perijinan tertentu merupakan kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama kurun waktu tahun 2000 s.d. 2007 memberikan kontribusi terbesar terhadap retribusi daerah, yaitu sebesar Rp 961.221.260,00 atau sekitar 68,0% dari keseluruhan

retribusi perijinan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kontribusi terbesar kedua adalah Ijin Gangguan yang merupakan pem-bayaran atas pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Besarnya adalah Rp 215.402.463,00 atau sekitar 15,24% dari keseluruhan retribusi perijinan tertentu. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Rata-rata Penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 s.d. 2007

No	Jenis Retribusi	Rata-Rata dalam Rp	Rata-rata dalam %
1	Ijin Mendirikan Bangunan	Rp 961.221.260	68,00%
2	Ijin Gangguan	Rp 215.402.463	15,24%
3	Ijin Trayek	Rp 55.231.031	3,91%
4	Ijin Usaha Perdagangan	Rp 68.961.147	4,88%
5	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Rp 11.862.500	0,84%
6	Ijin Usaha Angkutan	Rp 250.000	0,02%
7	Ijin Usaha Tetap	Rp 13.624.125	0,96%
8	Pemeriksaan di Laboratorium	Rp 22.498.398	1,59%
9	Ijin Kesehatan	Rp 7.259.375	0,51%
9	Ijin Pasar Modern	Rp 1.000.000	0,07%
10	Ijin Pasar Grosir/Pertokoan	Rp 12.280.023	0,87%
10	Administrasi Pengelolaan Pasar	Rp 904.438	0,06%
11	Ijin Pengelolaan Limbah Cair	Rp 2.468.750	0,17%
12	Retribusi TDP	Rp 40.678.125	2,88%
Jumlah		Rp 1.413.641.633	100,00%

Maka secara keseluruhan PAD yang berasal dari retribusi, paling besar disumbang dari golongan Retribusi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp 26.077.742.789,00 (86,90%), kemudian disusul oleh Retribusi Jasa Usaha Rp

2.516.314.760,00 (8,39%), dan terakhir berasal dari Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu sebesar Rp 1.413.641.633,00 (4,71%).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba Perusahaan Daerah)

Dalam rangka meningkatkan PAD, suatu daerah biasanya menanamkan sebagian kekayaannya pada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan/atau bersifat memupuk pendapatan. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sampai saat ini memiliki tiga sumber kekayaan daerah yang dipisahkan dalam perusahaan daerah,

yaitu investasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Bank Kredit Kecamatan/Bank Perkreditan Rakyat (BKK/BPR). Rata-rata kontribusi bagian laba yang diterima dari perusahaan daerah selama kurun waktu tahun 2000 s.d. 2007 didominasi oleh bagian laba dari BPR/BKK Rp 767.875.152,00 atau sekitar 39,8%, PDAM Rp 684.391.513,00 atau sekitar 35,5%, dan kemudian deviden dari BPD Jateng Rp 476.500.367,00 atau sekitar 24,7% (Tabel 5).

Tabel 5
Rata-rata Penerimaan Bagian Laba Perusda Kabupaten Banyumas Tahun 2000 s.d. 2007

Bagian Laba Perusahaan Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-Rata dalam %
BPD (Dividen)	Rp 476.500.367	24,7%
Perusahaan Air Minum BPR/BKK	Rp 684.391.513 Rp 767.875.152	35,5% 39,8%
Jumlah	Rp 1.928.767.031	100,0%

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah

Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor.

Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri. Jasa Giro memberi kontribusi terbesar selama kurun waktu dari tahun 2000 s.d. 2007, yaitu rata-rata sebesar Rp 5.967.545.388,00 atau sekitar 66,6% dari seluruh penerimaan PAD Lain-lain (Tabel 6).

Tabel 6
Rata-rata Penerimaan PAD Lain-Lain yang Sah Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 s.d. 2007

No	Pajak Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-rata dalam %
1	Hasil Pjln & Sewa Asset Mlk. Daerah	Rp 910.854.367	10,2%
2	Jasa Giro	Rp 5.967.545.388	66,6%
3	Sumbangan Pihak Ke Tiga	Rp 25.400.000	0,3%
4	Denda Keterlmbtn Plksan Pkjin	Rp 2.385.870	0,0%
5	Ganti Rugi Atas Kkyn Daerah	Rp 47.996.592	0,5%
6	Penerimaan Lain-Lain	Rp 2.013.120.490	22,5%
7	Pdptn Denda Ret. Perijinan Ttt.	Rp 261.566	0,0%
Total		Rp 8.961.266.465	100,0%

5. Perbandingan Kontribusi Masing-Masing Pos PAD

Rata-rata kontribusi masing-masing pos PAD Kabupaten Banyumas didominasi oleh pemasukan yang berasal dari Retribusi Daerah sebesar

56,07%, kemudian dari Pajak Daerah sebesar 23,58%, disusul dari pos PAD Lain-lain sebesar 16,74%, dan terakhir berasal dari Bagian Laba dari Perusahaan Daerah sebesar 3,60% (Tabel 7).

Tabel 7
Perbandingan Rata-rata PAD Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 s.d. 2007

No	Jenis PAD	Rata-Rata dalam Rp	Rata-rata dalam %
1	Pajak Daerah	Rp 12.618.855.612	23,58%
2	Retribusi Daerah	Rp 29.942.680.541	56,07%
3	Bagian Laba dari Perusda	Rp 1.928.767.031	3,60%
4	PAD Lain-lain	Rp 8.961.266.465	16,74%
Rata-Rata Jumlah PAD		Rp 53.516.588.291	100,00%

Analisis Kuantitatif

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana secara matematis variabel independen

mempengaruhi variabel dependen melalui pengujian hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	T test	Signifikansi
Pajak Daerah	0,226	19,697	0,000
Retribusi Daerah	0,515	17,995	0,000
Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	0,060	6,273	0,008
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,230	9,008	0,003
Adjusted R ² = 1	F Hitung = 15.492,280		

Dan jika hasil estimasi tersebut dibuat dalam model matematis maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 208.327.307,40 + 0,226X_1 + 0,515X_2 + 0,060X_3 + 0,230X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan dalam bahasa ekonomi sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 208.327.307,40 yang berarti bila Pajak Daerah (X_1) Retribusi Daerah (X_2), Bagian Laba Perusahaan Daerah (X_3), dan PAD Lain-lain (X_4) sebesar nol atau tidak ada, maka kebutuhan minimal yang harus ada adalah Rp 208.327.307,40.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X_1) bernilai 0,226 artinya bahwa setiap penambahan Pajak Daerah sebesar satu rupiah dan diasumsikan variabel independen lain tetap, maka PAD akan naik sebesar Rp 0,226.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X_2) bernilai 0,515 artinya bahwa setiap penambahan Retribusi Daerah sebesar satu rupiah dan diasumsikan variabel independen lain tetap, maka PAD akan naik sebesar Rp 0,515.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Bagian Laba Perusahaan Daerah (X_3) bernilai 0,060 artinya bahwa setiap

penambahan Bagian Laba Perusahaan Daerah sebesar satu rupiah dan diasumsikan variabel independen lain tetap, maka PAD akan naik sebesar Rp 0,060.

- e. Nilai koefisien regresi variabel PAD Lain-Lain (X_4) bernilai 0,230 artinya bahwa setiap penambahan PAD Lain-Lain sebesar satu rupiah dan diasumsikan variabel independen lain tetap, maka PAD akan naik sebesar Rp 0,23.

Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan *Adjusted R²* sebesar 1. Hal ini berarti secara matematis 100% PAD dipengaruhi oleh empat variabel independennya, yaitu Pajak Daerah (X_1) Retribusi Daerah (X_2), Bagian Laba Perusahaan Daerah (X_3), dan PAD Lain-lain (X_4). Hal ini sangat logis karena, baik dari sisi undang-undang yang mengatur dan praktek pengelolaan PAD yang terjadi empat variabel itulah yang mempengaruhi PAD suatu daerah.

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Secara Bersama-sama dengan Uji F

Setelah uji asumsi klasik dipenuhi (autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas), maka langkah berikutnya adalah menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan digunakan Uji F atau Uji ANOVA. Berdasarkan perhitungan pada analisis regresi linier berganda diperoleh F_{hitung} sebesar 15492,28 dan dengan *level of significant* 95% atau $\alpha = 0,05$ dan *degree of freedom* ($5-1=4$), ($8-5=3$) diperoleh F_{Tabel} sebesar 6,591. Hal ini menyebabkan $F_{hitung} > F_{Tabel}$ ($15492,28 > 6,591$), sehingga hipotesis variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. Sebenarnya dengan cara *quick look* juga sudah terindikasi bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel

dependen, karena nilai F_{hitung} lebih besar dari 4 (Ghozali, 2001).

b. Pengujian Secara Parsial dengan Uji t

Untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain PAD yang sah secara parsial digunakan Uji t. Dengan *level of significant* 95% atau $\alpha/2 = 0,025$ dan *degree of freedom* ($8-5=3$) diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 3,182. Sedangkan berdasarkan perhitungan pada analisis regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel IV.9
Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikansi
Pajak Daerah	19,697	3,182	0,000
Retribusi Daerah	17,995	3,182	0,000
Bagian laba BUMD	6,273	3,182	0,008
Lain-lain PAD yang sah	9,008	3,182	0,003

Dari Tabel 9 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai t_{hitung} untuk variabel Pajak Daerah sebesar 19,697 dan nilai signifikansi 0,000. Sementara nilai t_{tabel} untuk uji ini adalah 3,182, oleh sebab itu maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga hipotesis bahwa pajak daerah pengaruhnya positif dan signifikan terhadap PAD diterima.
- 2) Nilai t_{hitung} untuk variabel Retribusi Daerah sebesar 17,995 dan nilai signifikansi 0,000. Sementara nilai t_{tabel} untuk uji ini adalah 3,182, oleh sebab itu maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga

hipotesis bahwa Retribusi Daerah pengaruhnya positif dan signifikan terhadap PAD diterima.

- 3) Nilai t_{hitung} untuk variabel Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah sebesar 6,273 dan nilai signifikansi 0,008. Sementara nilai t_{tabel} untuk uji ini adalah 3,182, oleh sebab itu maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga hipotesis bahwa Laba Badan Usaha Milik Daerah pengaruhnya positif dan signifikan terhadap PAD diterima.
- 4) Nilai t_{hitung} untuk variabel Lain-Lain PAD sebesar 9,008 dan nilai signifikansi 0,003. Sementara nilai

t_{tabel} untuk uji ini adalah 3,182, oleh sebab itu maka $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ sehingga hipotesis bahwa pajak daerah pengaruhnya positif dan signifikan terhadap PAD diterima.

c. Uji Elastisitas

$$E_{X1} = 0,226 \frac{12.618.855.612}{53.326.319.650} = 0,053$$

$$E_{X2} = 0,515 \frac{29.942.680.541}{53.326.319.650} = 0,289$$

$$E_{X3} = 0,060 \frac{1.928.767.031}{53.326.319.650} = 0,002$$

$$E_{X4} = 0,230 \frac{8.961.266.464}{53.326.319.650} = 0,039$$

Hipotesis yang menyatakan, bahwa retribusi daerah berpengaruh lebih nyata dibandingkan dengan variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diterima. Hal ini karena angka elastisitasnya paling besar dibandingkan variabel inde-penden yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan juga termasuk pendapatan di luar PAD dikelola oleh salah satu dinas yang ada di suatu Kabupaten /kota. Nama dinas tersebut bisa berbeda-beda antar daerah. Dan untuk

Analisis elastisitas digunakan untuk mengetahui variabel independen manakah yang mempunyai pengaruh paling berarti terhadap variabel dependen (Pindyck, 1991). Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis regresi di atas, maka dapat diketahui besarnya masing-masing elastisitas variabel independen, yaitu:

Kabupaten Banyumas nama dinas tersebut sekarang ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Ada empat variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, mengingat pentingnya faktor keuangan dalam setiap penyelenggaraan pe-merintahan dan pembangunan, karena tidak ada kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tidak mem-butuhkan biaya (dana), maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inilah yang menyebabkan masing-masing faktor yang memengaruhi PAD suatu daerah substansinya bisa berbeda.

Sesuai analisis yang sudah dilakukan, maka secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan, bahwa:

1. Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah baik secara bersama-sama/serentak maupun secara parsial memberikan pengaruh yang sangat signifikan positif terhadap PAD suatu daerah.
2. Faktor pengaruh yang paling utama dihasilkan dari hasil retribusi daerah, kemudian hasil pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan terakhir paling kecil pengaruhnya adalah dari faktor hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan.
3. Dan jika secara deskriptif dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah secara rata-rata, maka hasil retribusi daerah Kabupaten Banyumas terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah di Jawa Tengah, sedangkan untuk ketiga faktor lain cenderung memiliki rata-rata lebih rendah.

Saran

Dalam rangka menuju kemandirian dalam otonomi daerah maka sangat penting untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengingat

PAD yang dihasilkan selama ini masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 9,3% dari keseluruhan penerimaan pendapatan daerah, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Berusaha untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap variabel yang mempengaruhi PAD secara kreatif, artinya sumber pemasukan makin diperkaya, tetapi tetap memacu pertumbuhan perekonomian di sektor riil, tidak sebaliknya, yaitu mempersulit ruang gerak masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.
2. Mencari solusi-solusi kreatif pada faktor yang sekarang ini hanya memberi kontribusi paling kecil, yaitu sektor hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, misalnya melalui pembangunan berbagai sektor pariwisata yang dikelola pemerintah daerah, mengingat sektor ini sebetulnya sangat berpotensi dikembangkan di wilayah geografis Kabupaten Banyumas.
3. Saran bagi penelitian sejenis di masa mendatang untuk meneliti berbagai kelayakan alternatif-alternatif faktor yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Banyumas, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam rangka menggali sumber keuangan sendiri menuju Banyumas mandiri dalam kerangka otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|---|--|
| <p>Abdurrahman, 1987, <i>Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah</i>, MSP, Jakarta.</p> | <p>Anonim, <i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997</i></p> |
|---|--|

- Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.*
- _____, *Keputusan Bupati Banyumas No. 129 Tahun 2000 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tataraja Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas.*
- Darumurti, Krishna, D, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi, Elita, 2002, *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, USU Digital Library
- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hair, J. F. Jr., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C. 1998. *Multivariate Data Analysis*, 5th ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Hasibuan, Nurimansyah, 1991, *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*, Prisma, Jakarta.
- Hirawan, Susiyati, 1997, *Pengaruh Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Kristadi, JB, 1986 *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Alumni, Bandung.
- Pyndick, Robert S., 1991, *Economic Models and Economic Forecasts*, Mc Graw Hill Inc., New York
- Riwu Kaho, Yosef, 1985, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1991, *Otonomi Daerah dan Titik Beratnya di letakkan pada Daerah Tingkat II*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soemitro, Rachmat, 1986, *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT. Eresco, Bandung.
- www.bpsjateng.go.id

